

# UPAYA PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA SEKOLAH

SIDIK PERMANA<sup>1</sup>, MURSYID SETIAWAN<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia  
Email: [sidiksipengelana@gmail.com](mailto:sidiksipengelana@gmail.com)

## ABSTRAK

Remaja berpotensi melahirkan tindakan kejahatan atau dikenal sebagai kenakalan remaja. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanganannya perlu diupayakan, salah satunya melalui pendidikan resolusi konflik. Hal itu bertujuan tidak hanya memberikan edukasi dalam penanganan konflik, bagi anak yang berhadapan (konflik) dengan berbagai persoalan, misalnya hukum, juga sebagai upaya dalam meminimalisir kenakalan remaja. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Pendidikan resolusi adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya institusi formal. Pihak-pihak tersebut mesti memperhatikan aspek-aspek penanganan dalam pendidikan resolusi konflik. Sehingga, fokus dalam pendidikan resolusi konflik adalah mengasah kecerdasan sosial dan penyelesaian masalah, meningkatkan kemampuan mendesain resolusi konflik, dan mendapatkan pengetahuan konflik secara positif. Melalui pendidikan resolusi konflik diharapkan individu dapat mempelajari dan mengatasi konflik yang dialami, serta mampu meningkatkan kualitas berpikir dalam menghadapi situasi konflik, khususnya dalam persoalan kenakalan remaja.

**Kata kunci:** resolusi, konflik, kenakalan remaja

## ABSTRACT

*Teenagers have the potential to give birth to criminal acts or known as juvenile delinquency. Therefore, prevention and handling need to be pursued, one of which is through conflict resolution education. It aims not only to provide education in handling conflict, for children who are dealing (conflict) with various issues, such as law, as well as an effort to minimize juvenile delinquency. This research method uses literature study. Resolution education is the responsibility of all parties, not only formal institutions. These parties must pay attention to handling aspects in conflict resolution education. Thus, the focus in conflict resolution education is honing social intelligence and problem solving, increasing the ability to design conflict resolutions, and gaining positive conflict knowledge. Through conflict resolution education it is hoped that individuals can learn about and overcome the conflicts they experience, and are able to improve the quality of thinking in dealing with conflict situations, especially in the problem of juvenile delinquency.*

**Keywords:** resolution, conflict, juvenile delinquency

## 1. PENDAHULUAN

Seseorang akan memasuki masa remaja, yaitu masa pencarian identitas dan makna diri. Pada usia inilah waktu pengembangan diri, seperti kognitif, emosional, psikomotorik, perlu diperhatikan, khususnya bagi orang tua. Hal itu tidak terlepas dari ketidaksiapan remaja dalam menghadapi berbagai pesan-pesan nilai dan simbol-simbol pengetahuan yang beredar di lingkungan dan semua hal yang dialaminya. Akibat ketidaksiapan itu, seorang anak yang memasuki usia remaja, dengan penuh rasa penasaran, kerap terkontaminasi nilai bebas, entah itu bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan atau tidak, sedangkan pada saat yang bersamaan terjadi pergolakan jiwa karena benturan dua nilai. Hal itu rentan terjangkit penyimpangan. Robert M. Z. Lawang, dilansir dari laman Tirto.id (2021), pernah menyebutkan jika penyimpangan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma-norma pada sistem kesosialan, termasuk di dalamnya ialah kenakalan remaja.

*United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, sebagaimana dikutip dari laman *The Asia Foundation* (2012), membeberkan beberapa fakta bahwa terdapat 80% anak/remaja di atas usia delapan tahun yang dilaporkan ke polisi berakhir di pengadilan, dengan 91% dari mereka harus menghabiskan waktu tiga bulan sampai tiga tahun di balik jeruji besi. Masih dari sumber *The Asia Foundation* (2012), di Indonesia sendiri, data menunjukkan terdapat 5.515 narapidana anak/remaja, sebanyak 85%-nya berada di rutan dewasa. Berita buruk ini ditambah oleh informasi dari *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2022), bahwa sebanyak 4.000-5.000 anak/remaja berada di pusat penahanan, lembaga pemasyarakatan, dan penjara dengan kemungkinan sedikit bahkan kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, atau rekreasi dan berisiko tinggi mengalami pelecehan fisik, seksual, dan emosional oleh tahanan lain.

Sedangkan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (2021), persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan, didasarkan pada jenis kelamin dan usia pada tahun 2020, ditemukan sebanyak 64,46% korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki, 35,54% korban perempuan, 94,32% korban kejahatan berusia dewasa, dan 6,58% korban kejahatan berusia anak-anak/remaja.

Di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri, Tubagus Ade Hidayat, dilansir dari laman *Jawapos.com* (2022), menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan, didapati fakta bahwa pelaku-pelaku kriminal yang berhasil di temukan pada beberapa titik TKP rata-rata berada di bawah usia 20 tahun, umumnya pelajar. Masih pada laman *Jawapos.com* (2022), dijelaskan bahwa fakta hasil analisis, terungkap berbagai kasus kriminal yang viral di sosial media dilakukan oleh orang usia belasan tahun.

Dalam riset yang dilakukan oleh Purnamasari (2018), terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan berupa kenakalan remaja, yaitu: 1) Kurangnya kasih sayang, perhatian, keharmonisan dari keluarga; 2) Kurangnya bentuk pengakuan dan interaksi sosial dengan masyarakat, ditambah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap anak-anak/remaja bermasalah; dan, 3) Ajakan dari teman, yang bersifat negatif, sehingga mendorong untuk bertindak menyimpang.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat didukung oleh tingginya ketimpangan sosio-ekonomi. Mario Coccia (2017) mengungkapkan, "... *Whereas a high level of socioeconomic inequality is a stimulant of frustration, anger and criminal behavior in society both at high and low latitudes*". Tekanan hidup semacam itu, dapat mendorong seseorang

untuk bertindak melawan hukum, terlepas untuk menyambung hidup atau sekadar eksistensi diri. Sayangnya, remaja juga kerap berada pada lingkaran tekanan itu. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga dan lingkungan cukup terabaikan, sehingga dalam mendorong terjadi kenakalan remaja. Dimuat dalam *The Jakarta Post* (2014), tim penyelidik dari Inggris dan Amerika mengungkapkan bahwa hampir 30% remaja berandalan berasal dari keluarga yang berantakan.

Upaya represif saja tidak cukup dalam menangani masalah kenakalan remaja. Salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dapat membentuk karakter remaja dan menanamkan nilai-nilai yang positif. Pendidikan menempati posisi krusial dalam mencegah generasi muda untuk terjerumus ke persoalan kenakalan remaja maupun kriminalitas. Program pendidikan seperti itu, ternyata didukung pula oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB. Dalam sebuah laporan dari *Department of Economic and Social Affairs*, PBB, berjudul *Juvenile Delinquency* (2003), dijelaskan bahwa, "*Educational programmes are helping young people learn how to engage in positive self-appraisal, deal with conflict, and control aggression.*" Harapan PBB melalui program dan pendekatan pendidikan itu adalah untuk mencegah kenakalan remaja, sehingga seorang remaja akan fokus pada pengembangan diri, profesional, dan kemasyarakatan, meningkatkan hubungan keluarga, keterampilan, dan memberikan nilai keadilan yang positif, baik bagi pelaku kenakalan remaja maupun korbannya.

Dalam hal ini, pendidikan resolusi konflik dapat menjadi gagasan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja. Resolusi konflik merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses terbentuknya komunikasi, baik dari pelaku maupun pihak luar terhadap kepentingan (*interests*) dan interpretasi atau penggambaran, antara pihak di luar yang berkonflik sebagai pihak ketiga, dengan komitmen atas informasi yang akurat dan terpercaya tentang situasi konflik untuk dimiliki (Arifin, 2020). Optimisme tersebut didasarkan pada hasil riset dari Trinder, dkk. (2010) yang menjelaskan bahwa sejumlah hasil program resolusi konflik telah dikembangkan, diimplementasikan, dan dievaluasi, hasilnya menunjukkan bahwa program ini sangat berguna dalam berbagai konteks, termasuk di sekolah dasar dan di sekolah menengah. Oleh karena itu, sudah tepat bila pendidikan resolusi konflik dapat diimplementasikan di berbagai institusi pendidikan, termasuk institusi informal seperti keluarga, dalam menanggulangi patologi sosial seperti kenakalan remaja.

## 2. METODE

Metode ini menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut Adlini dkk., (2022), penelitian kualitatif merupakan salah satu dari metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sehingga, peneliti mesti hadir dalam fokus dalam memperhatikan kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Metode penelitian pada riset ini menggunakan studi pustaka/literatur (*library research*). Studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, dkk., 2022). Dalam penelitian berbasis studi literatur, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guna kelancaran dalam proses pencarian hingga analisis. Dalam hal ini, Zed (dalam Adlini, dkk., 2022), menjelaskan bahwa persiapan studi literatur diantaranya menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konflik sebagai Akar Permasalahan

Konflik akan selalu ada dalam berbagai kesempatan. Terlepas bagaimana konflik itu berjalan, kenyataannya selama manusia menghendaki adanya perubahan atau perbedaan, maka konflik akan lahir di dalamnya. Suparlan (2006), sebagaimana terinspirasi dari Dahrendorf, pernah menyebutkan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sesuatu yang endemik, yaitu layaknya virus akan selalu ada dalam kehidupan sosial manusia. Begitu luasnya konsep konflik ini, ada beberapa pandangan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam memahami konflik. Dilihat dari perspektif sosiologi, konflik memang merujuk pada referensi kepentingan (*value*) subjek sebagai pusat dari fenomena ini. Berbagai kepentingan yang saling berbenturan dan berusaha menuju kepermukaan itu jelas akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai proses (Zuldin, 2019).

Berbicara tentang konflik, kita harus memperhatikan juga konsensus (kesepakatan bersama), yang mana hal itu menjadi faktor dari lahirnya suatu konflik, termasuk upaya penyelesaiannya juga. Maka dari itu, Zuldin (2019) sudah tepat menyebutkan bahwa tidak akan ada konflik tanpa kehadiran konsensus sebelumnya, begitu juga sebaliknya bahwa konflik dapat menghasilkan konsensus dan integrasi. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan persoalan perbedaan pandangan terhadap suatu nilai, persoalan tentang pertentangan dua objek yang berujung pada perselisihan dua hal yang dinilai paling mendekati "kesesuaian". Dikarenakan konsep tersebut lahir dari benak seseorang, tentunya perbedaan itu akan selalu abadi.

Namun, apakah konflik tidak bisa dihilangkan dalam suatu waktu, atau minimal dikompromikan? Tentu saja bisa. Pandangan Timpe (1988), yang dipengaruhi oleh Leonard Greenhalgh, berpendapat, "Konflik bukanlah suatu fenomena yang obyektif dan nyata, tetapi ada dibenak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perwujudannya dapat berupa ekspresi sedih, berdebat, atau perkelahian yang terlihat nyata." Hal yang menarik adalah Leonard Greenhalgh, dikutip oleh Timpe (1988), menilai bahwa untuk menghentikan konflik maka seseorang harus mulai menumbuhkan sikap empatinya karena dengan jalan itulah orang-orang akan memahami keadaan para pelaku di dalamnya. Ujungnya, persoalan empati ini berkaitan dengan manajemen hati antar pihak untuk menghentikan konflik.

Dalam terminologi ilmiah, resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka, lalu membagi proses penyelesaian konflik secara empiris (Arihan, Zuber, & Haryono, 2018). Gibbons (2010) menjelaskan jika konflik bisa jadi berdimensi antarpribadi atau antarkelompok, mungkin juga melibatkan kemarahan, intimidasi, dan kekerasan dalam menghadapi tiap sudut pandang, kebutuhan, dan keinginan berbeda dari orang yang berbeda pula. Pendidikan resolusi konflik hadir dalam upaya menangani permasalahan kenakalan remaja sebagai sebuah konflik yang berorientasi pada hal negatif. Melalui pendidikan resolusi konflik, maka diharapkan para remaja dapat membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik.

Bila dicermati, pada hakikatnya konflik merupakan bentuk ketidakseimbangan yang melibatkan satu atau lebih orang atau kelompok. Beberapa mungkin memandang konflik ini realistis, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengharapkan sesuatu yang tidak realistis. Maka, tidak heran bila Suparlan (2006) menyebutkan bahwa konflik dan dinamika kehidupan masyarakat yang anti kestabilan adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak fungsional dalam kehidupan dalam perspektif ekuilibrium (keseimbangan).

### 3.2 Kenakalan Remaja sebagai Konflik yang Harus Ditangani

Fenomena kenakalan remaja menunjukkan adanya pertentangan nilai dan ketidaksiapannya dalam menghadapi ambiguitas dunia, terutama dalam mencerpai berbagai nilai-nilai sebagai syarat keterlibatannya dalam pergaulan sosial manusia. Maka, bisa dikatakan bahwa persoalan kenakalan remaja juga merupakan ranah yang tepat untuk digambarkan sebagai persoalan konflik. Masalahnya, kenakalan remaja ini menyebar bagaikan virus dan terjadi di mana pun dan kapan pun. Fenomena ini bahkan menjadi kekhawatiran akhir-akhir ini.

Kenakalan remaja sendiri, menurut Young dan Giller (2021), sebagaimana diungkap pula oleh Shoemaker, dikenal sebagai *Juvenile Offending*, yaitu sebuah konsep yang mengacu pada tindakan ilegal, baik pidana atau pelanggaran status, yang dilakukan oleh orang-orang muda/remaja di bawah usia 18 tahun. Kenakalan semacam ini akan berdampak pada keluarga, dan masyarakat, termasuk bagi dirinya sendiri. Tidak heran, beberapa pihak, khususnya negara, terlebih Indonesia sangat menaruh perhatian pada persoalan kenakalan remaja. Hal serupa dikemukakan oleh A. V. Cicourel (2017) yang menjelaskan bahwa, "*Delinquency is a problem to the family, public safety, the lives of young people themselves and law enforcement agencies at large and as a result a country has to bear a lot of costs associated with delinquency cases.*" Intinya, fenomena kenakalan remaja ini dapat merugikan semua pihak, termasuk pelakunya sendiri. Penyelesaian hukum pun masih belum tentu menyelesaikan masalah ini, sekalipun dengan sanksi pidana (bila pelaku kenakalan remaja bertindak kriminal) yang cukup memberatkan.

Hal yang lebih buruk dari kenakalan remaja ini adalah bila sampai harus masuk ke ranah pidana atau kriminalitas. Hirsch (2017) membagi kenakalan remaja ke dalam beberapa klasifikasi sesuai dengan bentuk pelanggarannya, di antaranya: *incorrigibility* (ketidaktaatan), *truancy* (kebolosan), *larceny* (pencurian), *destruction of property* (perusakan properti, baik individu atau publik), *violence against individual* (kekerasan), dan *community and sexual offences* (kejahatan seksual). Meskipun, tidak menutup kemungkinan ada banyak bentuk kenakalan remaja, yang tidak teridentifikasi oleh Hirsch dalam risetnya.

Karlina (2020) pernah menjelaskan kelirunya pemaknaan konsep diri menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, kurang mampu dipahami dan cenderung diabaikan. Hal itu membuat seorang remaja bimbang dan ragu, namun di saat yang bersamaan ia mesti dihadapkan pada pilihan hidup. Sejak awal sudah dibahas bahwa seseorang pada rentang remaja harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan, hal itu dilakukan untuk menghindari persoalan ini. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan (Aroma & Suminar, 2012). Baik itu gagal karena dirinya sendiri atau subjek yang seharusnya mengembangkan tugas itu, seperti orang tua.

Tidak hanya menasar pada orang tua, kontrol diri pun seharusnya menjadi perhatian dan dilatihkan kepada seorang remaja sejak dini. Individu yang memiliki kontrol diri rendah cenderung mudah terbawa arus dalam pergaulan (Aviyah & Farid, 2014). Karena, menurut Aviyah dan Farid (2014), tingkat religiusitas dan kontrol diri yang baik akan memperkecil kecenderungan kenakalan remaja. Konsep ini erat kaitannya dengan pendidikan resolusi konflik yang seharusnya diterapkan di pendidikan keluarga atau institusi formal. Terdapat hubungan negatif antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja

(Aroma & Suminar, 2012). Artinya, semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah kecenderungan perilaku kenakalan remaja.

Elliott, seperti dikutip oleh Young dan Giller (2021), berusaha mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi dalam meningkatkan angka kenakalan remaja. Dari situlah, ia melihat laporan dari *Juvenile Crime: Opposing Viewpoints* dan menemukan bahwa paparan kekerasan pada masa kanak-kanak beresiko tinggi dalam meningkatkan perilaku kekerasan selama masa remaja dengan persentase sebesar 40%. Sekolah pun bisa menjadi sarang bagi kenakalan remaja yang menciptakan berbagai konflik mental dan pikiran, sehingga mendorong masalah-masalah psikis muncul. Hal itu dipertegas oleh Young dan Giller (2021) yang menyebutkan, "*Environment, the school also has its own potential for generating conflict, frustration, and violent responses to these situations.*"

Bila dirinci, Santrock (2007) menilai beberapa faktor penyebab kenakalan remaja, di antaranya: 1) Identitas; 2) Kontrol diri; 3) Usia; 4) Jenis kelamin; 5) Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah; 6) Proses keluarga; 7) Pengaruh teman sebaya; 8) Kelas sosial ekonomi; 9) Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. Cukup banyak, dan beberapa di antaranya bahkan mempertegas riset-riset yang telah dibahas sebelumnya.

Kenakalan remaja merupakan konflik pergulatan nilai, baik dari pribadi maupun dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan, yang membuat seorang remaja rapuh dalam menegaskan karakternya akibat gagalnya dalam belajar untuk mengembangkan karakter atau akibat faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk membenturkan nilai-nilai dan menciptakan ambiguitas dan ketidakseimbangan bagi si remaja, sedangkan ia masih belum siap. Dapat dikatakan, kenakalan remaja adalah konflik yang melibatkan banyak pihak, sehingga dalam penanganannya memerlukan kolaborasi banyak pihak. Namun, dalam upaya pencegahan, terdapat satu konsep yang disepakati bahwa pendidikan merupakan cara efektif dalam menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja agar tidak semakin meluas. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan resolusi konflik, yang menanamkan karakter penyelesaian konflik sejak awal sehingga meminimalisir konflik yang terbentuk akibat kenakalan remaja sebelum aksi tersebut terjadi.

### **3.3 Pendidikan Resolusi Konflik dalam Menangani Kenakalan Remaja Sekolah**

Setelah melihat berbagai persoalan kenakalan remaja sebagai sebuah konflik, tentunya perlu diupayakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut, yaitu pendidikan resolusi konflik. Perlu ditekankan di sini bahwasanya pendidikan resolusi konflik ini bukan hanya mengacu pada institusi formal pendidikan saja. Kita sudah menyepakati bahwa persoalan kenakalan remaja merupakan tanggung banyak pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga resolusinya adalah pihak-pihak yang terkait harus turut-serta dalam mengatasi masalah ini. Hakikatnya pendidikan resolusi konflik ialah aktivitas umum yang bisa diterapkan oleh masing-masing individu, keluarga, organisasi masyarakat atau lembaga pendidikan (Jones, 2002).

Pendidikan resolusi konflik menjadi jalan dalam upaya preventif untuk meminimalisir kenakalan remaja. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendidikan resolusi konflik diperuntukan untuk apa. Dalam hal ini, Dewi, dkk. (2019) menjelaskan bahwa pendidikan resolusi konflik memiliki fokus dalam mengatasi sikap-sikap berikut, di antaranya: 1) *No empathy*, yaitu menutup diri untuk membantu orang lain karena kurangnya kepekaan rasa; 2) *No collaborative intelligence*, yaitu tidak cerdas menangkap peluang kerja sama dengan berbagai pihak yang bersimbiosis; 3) *No conflict resolution intelligence*, yaitu cenderung pasif dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menyelesaikan konflik; 4) *No social intelligence*, yaitu

kurang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat; 5) *No skill personal*, yaitu kurang mampu membina hubungan dekat; 6) *Using force/violence*, yaitu tidak mampu mengendalikan emosi dan kerap menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan pendidikan resolusi konflik memposisikan upaya resolusi atau penyelesaian, tentunya yang perlu diperhatikan adalah upaya mengakhiri perselisihan (konflik).

Pendidikan resolusi konflik berarti mengupayakan penyelesaian masalah suatu konflik. Dengan statusnya sebagai pendidikan, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendidikan resolusi konflik. Prinsip dan proses belajar-mengajar harus memiliki orientasi dan tujuan yang jelas (Adams, 1992). Kemudian, Sweeney dan Carruthers, dikutip Latipun (2013) menyebutkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya: 1) Keseluruhan kondisi orang-orang yang konflik melibatkan pengalaman dan tidak statis; 2) Pihak-pihak dalam konflik merupakan pembuat (*cocreator*) suatu konflik dan mereka bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut; 3) Pihak-pihak yang berbeda kepentingan harus tidak berseberangan (*opposite*), tetapi saling mendukung bagi menyelesaikan perselisihan antar mereka; dan, 4) Penyelesaian sama-sama untung (*win-win solution*) harus dicapai sehingga seluruh pihak memperoleh keuntungan dari suatu proses resolusi konflik.

Atas dasar itulah, pendidikan resolusi konflik tidak begitu saja terwujud. Setidaknya ada ukuran yang dapat menyebutkan bahwa model semacam itu bisa disebut sebagai pendidikan resolusi konflik. Bagi Adams (1992) hal-hal semacam itu harus diketahui oleh lembaga pendidikan atau sekolah tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum pendidikan konflik yang mencakup: serangkaian kegiatan yang memungkinkan bagi lembaga pendidikan tersebut, memajemen unsur kelemahan dan kelebihan (*school mapping*), menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas guru dan kemampuan siswa (*objectives and lesson design*), memperbaiki sistem pengelolaan pembelajaran yang berkelanjutan dan efisien (*scope and sequence*), dan membuat rangkaian sistem pengawasan dan evaluasi pembelajaran yang efektif-komprehensif.

Seperti yang telah dijelaskan, pendidikan resolusi konflik berarti berupaya menyelesaikan masalah. Misi itu adalah hal yang utama. Walaupun demikian, terdapat strategi dalam pendidikan resolusi konflik yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, juga mendidik remaja tersebut untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan membaca situasi dan secara komprehensif melihat perkembangannya. Semua itu merupakan kewajiban yang harus diwujudkan dalam pendidikan resolusi konflik. Bagaimana pun, prinsip-prinsip pendidikan resolusi konflik sudah memberikan gambaran bahwa ini bukan sekadar menyelesaikan satu persoalan, namun bagaimana semua subjek dilibatkan dan memberikan hasil yang berkeadilan. Karenanya, mengembangkan kepekaan sosial, kecerdasan individu, dan *problem solving* adalah komponen yang tidak bisa diabaikan dalam model pendidikan resolusi konflik.

Guna menjalankan pendidikan resolusi konflik, ada strategi pengorganisasian yang dapat dijalankan, guna memetakan dan membantu penyelesaian konflik dari berbagai dimensi. Dikutip dari Dewi, dkk. (2019), berikut adalah cara-cara pengorganisasian Pendidikan Resolusi Konflik. Pertama, adalah mengasah kecerdasan sosial dan *problem solving*. Hal ini berupaya untuk membentuk kepekaan sosial sebagai modal awal untuk membentuk kepribadian yang bijaksana ketika dihadapkan dengan konflik yang lebih besar dan kompleks nanti. Kedua, adalah dengan meningkatkan kemampuan mendesain resolusi konflik. Kemampuan desain ini guna mempermudah dan mengoptimalkan daya dan upaya dalam menyelesaikan suatu konflik, juga mengasah kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan lebih akurat dan cerdas. Terakhir, adalah membantu mendapatkan dan membentuk pengetahuan konflik yang

positif. Inilah yang diharapkan dari karakter agar peka dalam menghadapi konflik melalui resolusi cerdas.



**Gambar 1. Strategi Pengorganisasi Pendidikan Resolusi Konflik (Dewi, dkk. 2019)**

Mengingat pendidikan resolusi konflik yang terukur, maka untuk mengunci dan memantau keberhasilannya diperlukan suatu upaya evaluasi untuk menilai sejauh mana pendidikan resolusi konflik ini bekerja dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Menurut Jones (2002), evaluasi harus mengukur tingkat keberhasilan (*outcome*) dari program pendidikan resolusi konflik, dimana indikator yang digunakan sebagai acuan evaluasi dan *assesment* ini meliputi: 1) Keterampilan resolusi konflik yang dipelajari (*skill & ability learned*), yang mana pada tahap ini evaluasi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa baik siswa mampu menjadi pendengar yang baik, bersikap objektif, minim prasangka, respons empati, mencari alternatif-alternatif respons, mampu kontrol diri, dan lain-lain; 2) Perubahan sikap (*attitudes changed*), seperti perubahan sikap peserta yang menjadi lebih pro-sosial, tidak egois, dan lainnya. Poin evaluasinya terletak pada bagaimana sikap siswa terhadap perbedaan, bentuk penghormatan pada lingkup rentang usia, sikap siswa dalam mempersepsikan masalah dan konflik, dll; dan, 3) Perubahan perilaku (*behaviors changed*), sekaligus menjadi aspek yang paling penting berkaitan dengan pendidikan karakter. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang dengan kecerdasan dan *skill* resolusi konflik berbanding lurus dengan kualitas perilaku. Pada level sekolah, evaluasi yang dilakukan umumnya mengacu pada sikap dan perilaku peserta didik, seperti semakin jarang bertengkar/berkelahi di kelas maupun di luar kelas, pembentukan kelompok-kelompok atau geng-geng sekolah, *bullying*, dll.

Dewi, dkk. (2019) mengungkapkan beberapa misi yang hendak dicapai dari implementasi pendidikan resolusi konflik, meliputi: 1) Siswa mampu memahami konflik; 2) Siswa mampu mengendalikan emosi; 3) Siswa mampu mengatasi konflik secara konstruktif. Dengan begitu, bila diperluas ke persoalan warga negara, maka tujuan dari pendidikan ini adalah mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, cerdas, dan tentunya bijaksana dalam menanggapi berbagai permasalahan. Secara garis besar, pendidikan resolusi konflik berusaha membentuk peserta didik yang cerdas dalam menghadapi situasi sulit semacam konflik.

Ketika capaian kewarganegaraan yang cerdas itu tercapai, hendaknya hal itu dapat dipertahankan. Kembali pada persoalan di awal, bahwa kenakalan remaja merupakan tanggung jawab semua pihak yang mengindikasikan adanya tanggungan sosial. Dengan ketersediaan ruang dalam mengeksplorasi diri sembari berada dalam pembimbingan, maka diharapkan peserta didik dapat mengalihkan kenakalannya ke bentuk resolusi konflik atau bahkan masuk ke ranah konflik lain yang bertujuan untuk diselesaikan. Harapannya permasalahan ini dapat diminimalisir di masa depan. Selain dapat membantu negara, juga

berdampak baik bagi lingkungan, keluarga dan dirinya. Sebab, bila fenomena permasalahan remaja di Indonesia berupa konflik interpersonal jika tidak ditangani dan diarahkan secara tepat sedikitnya berdampak pada hubungan sosial, konsentrasi belajar, bahkan perkembangan diri individu tersebut (Nadya, Malihah, & Wilodati, 2020).

#### **4. KESIMPULAN**

Kenakalan remaja sejatinya adalah konflik yang dialami para remaja. Konflik tersebut terus-menerus berperang dalam pikiran seorang remaja yang kala itu berada dalam masa perkembangan dan pematangan fisik dan psikis. Hal itu membuat para remaja bimbang dan tidak bisa menciptakan sebuah langkah dan gagasan pasti serta cenderung spekulatif dan penuh rasa penasaran. Pencarian jati diri pun menjadi salah satu faktor yang membuat seorang remaja terus mencari makna dari hidup dan jalannya. Konflik batin itu pada akhirnya membuat bimbang para remaja.

Fenomena kenakalan remaja menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Sudah banyak kasus para remaja yang melakukan tindakan pidana, juga pelanggaran hukum lainnya. Seolah semua itu adalah bentuk kebiasaan atau dimaknai sebagai tindakan dan sikap yang bernilai oleh beberapa kalangan remaja lainnya. Tidak terlepas dari masalah-masalah batin dan psikis, beberapa remaja terkadang bertindak tanpa memperhatikan dampak jauh ke depan. Dengan pandangan tersebut, wajar saja bila kenakalan remaja semakin menjamur di Indonesia dan cukup sulit juga menindak para pelaku kenakalan remaja, sekalipun telah bertindak kriminal.

Kenakalan remaja juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dirinya. Bila sebelumnya faktor internal, maka pendorong lainnya datang dari luar yang umumnya paling besar dalam mendorong tindakan semacam itu. Hal yang perlu disoroti adalah kondisi keluarga dan lingkungan, yang menjadi pendorong terbesar seorang remaja melakukan penyimpangan dan berimbas pada kenakalan remaja. Masalah-masalah itu terus memucak sehingga menimbulkan konflik, tidak hanya konflik dalam dirinya namun menyembur keluar menjadi konflik di masyarakat bahkan berdampak pada negara. Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua pihak dalam menanggulangnya karena semuanya turut bertanggung jawab.

Pendidikan resolusi konflik menjadi salah satu solusi pencegahan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kenakalan remaja sebelum kenakalan itu terjadi. Melalui pendidikan ini, seorang remaja dididik untuk dapat bersikap cerdas dan bijak dalam upaya mencari resolusi dari setiap permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak bisa serta-merta diselesaikan tanpa adanya ukuran. Tentunya, perlu pemikiran dan perenungan juga aksi nyata dalam setiap upaya penyelesaian problematika kenakalan remaja. Perlahan-lahan pendidikan ini akan menjadi pendidikan karakter dan membantu peserta didik untuk melewati masa-masa kritisnya pada saat remaja. Bekal ini adalah bekal di masa depan.

Perlu dicatat, pendidikan resolusi konflik bukanlah hanya konsep yang diterapkan di sekolah atau institusi resmi lainnya, walau memang umumnya demikian. Namun, pada hakikatnya, pendidikan resolusi konflik ini bisa dilakukan oleh semua lapisan, khususnya keluarga dan lingkungan. Itulah mengapa, pendidikan resolusi konflik adalah upaya kolaboratif, sehingga akan lebih efisien dan efektif.

Upaya ini sangatlah ideal dan dampaknya akan sangat bagus bila sampai diimplementasikan secara konsisten. Tentunya, perlu ada dukungan dari sumber daya yang ada agar pendidikan resolusi konflik bisa berjalan dan memberikan hasil yang nyata.

## DAFTAR RUJUKAN

### Rujukan Buku:

- Adams, M. (1992). *Promoting diversity in college classrooms: Innovative responses for the curriculum, faculty, and institutions*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cicourel, A. V. (2017). *The Social Organization of Juvenile Justice*. London: Routledge.
- Dewi, S. F., Indrawadi, J., Anas, S., Hulfareza, A., Angraini, N. M., & Ningsih, W. A. (2019). *Desain Pendidikan Resolusi Konflik*. Purwokerto & Malang: CV. IRDH. IKAPI.
- Hirsch, T. (2017). *Causes of Delinquency*. New York, YK: Routledge.
- Jones, T. S. (2002). *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*. Ohio: Ohio State Board of Education.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak*. DKI Jakarta: Erlangga.
- Timpe, A. D. (1988). *Managing People*. New York: Facts on File.

### Rujukan Jurnal:

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan: Edumaspul*, *VI*(1), 974-980.
- Arifin, M. H. (2020). Efektivitas Peranan Budaya Lokal dan Penguatan Karakter sebagai Media Pendidikan Resolusi Konflik pada Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *II*(1), 1-73.
- Aroma, I. S., & Suminar, D. R. (2012). Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, *I*(2), 1-6.
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, *III*(2), 126 - 129.
- Coccia, M. (2017). A Theory of General Causes of Violent Crime: Homicides, Income Inequality and Deficiencies of the Heat Hypothesis and of The Model of CLASH. *Aggression and Violent Behavior*, *XXXVII*, 190-200. Diakses dari [www.elsevier.com/locate/aggyiobeh](http://www.elsevier.com/locate/aggyiobeh).
- Gibbons, K. (2010). Resolution in the Classroom. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, *XXVII*(2), 84-89. doi:doi.org/10.1080/07421656.2010.10129716.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Non-Formal*, 147-158.
- Nadya, F., Malihah, E., & Wilodati. (2020). Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal dan Urgensinya pada Siswa. *Societas*, *X*(1), 775-790.

- Purnamasari, L. (2018). *Akar Sebab Siklus Penyimpangan Pada Remaja: Penelitian Tentang Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/13773/>.
- Suparlan, P. (2006). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia*, XXX(2), 138-150.
- Trinder, M., Wertheim, E. H., Freeman, E., Sanson, A., Richardson, S., & Hunt, S. (2010). Comparison of the Effectiveness of Two Forms of the Enhancing Relationships in School Communities Project for Promoting Cooperative Conflict Resolution Education in Australian Primary Schools. *Journal of Peace Education*, VII, 85–105. doi:doi.org/10.1080/17400201003640228.
- Young, H., & Giller, C. (2021). Juvenile Delinquency in the United States of America. *Journal of Sociology*, III(4), 1-7.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, II(1), 157-183.

#### **Rujukan Prosiding:**

- Arihan, A., Zuber, A., & Haryono, B. (2018). Resolusi Konflik Komunal dengan Pendekatan Budaya Maja La'bo Dahu Antara Warga Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Proceeding of The URECOL*, (pp. 165-175). Bima.

#### **Rujukan Sumber *Online* :**

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Department of Economic and Social Affairs, United Nations. (2003). *World Youth Report*. Diakses dari [www.un.org](http://www.un.org): <https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/world-youth-report-2003.html>.
- Jawapos.com. (2022, Maret 12). *Fenomena Kenakalan Remaja Berujung Kriminalitas*. Diakses dari [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com): <https://www.jawapos.com/jabodetabek/12/03/2022/fenomena-kenakalan-remaja-berujung-kriminalitas/>.
- Latipun. (2013). *Konseling Berfokus Resolusi Konflik Antar Sebaya: Dari Perselisihan ke Perdamaian di Kalangan Remaja*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

The Asia Foundation. (2012, Februari 1). *Frustrated, Indonesians Demand Changes in Juvenile Justice System*. Diakses dari [asiafoundation.org](https://asiafoundation.org): <https://asiafoundation.org/2012/02/01/frustrated-indonesians-demand-changes-in-juvenile-justice-system/>.

The Jakarta Post. (2014, Juni 21). *Your Letters: Juvenile Delinquency*. Diakses dari [www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com): <https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/21/your-letters-juvenile-delinquency.html>.

Tirto.id. (2021, Maret 5). *Mengapa Kenakalan Remaja Disebut Perilaku Menyimpang?* Diakses dari [tirto.id](http://tirto.id): <https://tirto.id/mengapa-kenakalan-remaja-disebut-perilaku-menyimpang-gaSK>.

United Nations. (2022, April 25). *Indonesia Establishing a Child-Sensitive Juvenile Justice System in Indonesia*. Diakses dari [www.un.org](http://www.un.org): <https://www.un.org/ruleoflaw/files/indonesia.doc>.